BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis dalam administrasi publik global. Pemerintah di berbagai negara berlomba-lomba mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Dalam konteks sektor publik, inovasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan (Iwan Ahmad Puji Santoso, 2025). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta transparansi pengelolaan dana desa.

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan desa, alokasi Dana Desa di Indonesia menunjukkan tren peningkatan sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2015. Secara kumulatif, total Dana Desa yang telah dialokasikan pemerintah sejak tahun 2015 hingga 2024 mencapai lebih dari Rp609 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Namun, besarnya alokasi dana tersebut juga diikuti dengan tingginya risiko penyimpangan dalam pengelolaannya. Data dari Indonesia *Corruption Watch* menunjukkan bahwa sektor desa menjadi

salah satu sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi sejak tahun 2015 hingga 2021, dengan total 592 kasus dan kerugian negara mencapai sekitar Rp433,8 miliar (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Salah satu inovasi yang dikembangkan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa. SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 2015 untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih sistematis (Malahika et al., 2018). Implementasi aplikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Hingga tahun 2024, SISKEUDES telah diimplementasikan di lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu program digitalisasi tata kelola pemerintahan desa terbesar di Asia Tenggara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024) hal tersebut menunjukan bahwa inovasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan tata kelola publik.

Inovasi telah menjadi fenomena krusial dalam perkembangan peradaban manusia modern. (Drucker, 1985) mendefinisikan inovasi sebagai alat spesifik kewirausahaan yang memungkinkan perubahan menjadi peluang bagi bisnis atau

layanan yang berbeda. Hal ini diperkuat oleh laporan *Global Innovation Index* (World Intellectual Property Organization, 2023) yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat inovasi tinggi memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global. Negara-negara maju telah membuktikan hal tersebut melalui rekam jejak yang impresif. Penerapan inovasi ini telah membawa dampak nyata yang dapat diukur secara empiris.

Keberhasilan dari sebuah inovasi implementasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dan pola kolaborasi yang dibangun di dalam ekosistem pemerintahan desa. Kapasitas organisasi mencerminkan kemampuan internal pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, membangun kompetensi aparatur, serta menciptakan struktur tata kelola yang adaptif terhadap perubahan (Daft, 2021).

Sementara itu, kolaborasi antar pihak baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pendamping desa menjadi prasyarat penting dalam mendorong difusi inovasi secara efektif, di mana kolaborasi lintas-aktor ditegaskan sebagai elemen kunci keberhasilan transformasi digital di sektor publik (Maulana, 2023). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia contohnya aparatur desa menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan sistem informasi keuangan desa (Liao et al., 2023) Dengan demikian, kapasitas organisasi dan kolaborasi merupakan dua faktor kunci yang menentukan sejauh

mana inovasi digital mampu menghasilkan manfaat nyata bagi pengelolaan keuangan desa.

Berbagai penelitian terdahulu sesungguhnya telah membuka pintu untuk memahami faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi di sektor publik.(Ariyanto et al., 2022) membuktikan bahwa kualitas sistem berpengaruh terhadap *net benefits* SISKEUDES melalui jalur kepuasan pengguna, sementara (Desak Putu Wahyu Widyaswari et al., 2024) menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia menjadi penentu utama keberhasilan tersebut. Dari sisi kapasitas organisasi,(Liao et al., 2023) menunjukkan bahwa kemampuan organisasi berpengaruh positif terhadap kapasitas penyerapan sistem informasi, dan (Aligarh et al., 2023) memperkuat temuan tersebut dengan membuktikan bahwa kapasitas organisasi merupakan prasyarat fundamental efektivitas implementasi sistem informasi keuangan desa. Adapun (Maulana, 2023), melalui tinjauan literatur sistematis, menegaskan bahwa kolaborasi lintas-aktor adalah elemen kunci yang tidak dapat diabaikan dalam keberhasilan transformasi digital sektor publik.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor keberhasilan implementasi SISKEUDES, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis sistem seperti kualitas informasi, kualitas layanan, dan kompetensi pengguna. Penelitian mengenai kapasitas organisasi dan kolaborasi dalam konteks implementasi SISKEUDES masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum menempatkan *Diffusion of Innovations*

sebagai variabel mediasi yang menjelaskan bagaimana kapasitas organisasi dan kolaborasi dapat menghasilkan *net benefits* SISKEUDES Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi landasan utama penelitian ini.Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model integratif yang menghubungkan kapasitas organisasi, kolaborasi, *Diffusion of Innovations*, dan *net benefits* dalam konteks implementasi SISKEUDES pada pemerintah desa di Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Wonogiri dipilih sebagai fokus penelitian ini mengingat kedudukannya sebagai salah satu daerah dengan jumlah desa terbanyak di Jawa Tengah, yakni 251 desa, sekaligus menghadapi tantangan nyata dalam implementasi SISKEUDES yang terdokumentasi secara empiris. BPKP Jawa tengah pada tahun 2019 mencatat bahwa seluruh 251 desa di Kabupaten Wonogiri telah mengimplementasikan SISKEUDES. Meskipun aplikasi SISKEUDES telah diterapkan di desa-desa Kecamatan Wonogiri, implementasinya masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur dan evaluasi secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) SISKEUDES dan Perencanaan Desa yang dilaksanakan oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kecamatan Wonogiri. Meskipun Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah diterapkan sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pemanfaatannya belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari masih dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan evaluasi penerapan SISKEUDES bagi aparatur desa di Desa Sendang kabupaten Wonogiri pada tahun 2024. Menurut ProDESA Desa Sendang (2024), kegiatan tersebut

bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan SISKEUDES sekaligus meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan. Kebutuhan akan Bimtek yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES masih menghadapi permasalahan, baik terkait kompleksitas penggunaan sistem, pemahaman pengguna yang belum merata, maupun kendala dalam mengintegrasikan prosedur administrasi keuangan desa ke dalam aplikasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem saja belum mampu menjamin efektivitas pengelolaan keuangan desa apabila tidak diimbangi dengan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan dan memanfaatkan fitur-fitur sistem secara tepat.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh temuan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri yang menunjukkan masih tingginya jumlah temuan pada pemerintah desa. Sepanjang tahun 2022 hingga semester pertama 2023, Inspektorat menemukan 278 potensi pelanggaran, dengan 236 temuan atau sekitar 84% berasal dari hasil audit pemerintah desa dan kelurahan. Temuan tersebut didominasi oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan, kelemahan sistem pengendalian internal, serta persoalan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Tingginya jumlah temuan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi SISKEUDES belum sepenuhnya mampu mendukung tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan bebas dari kesalahan administrasi. Dengan demikian, masih diperlukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penggunaan SISKEUDES, karena keberadaan aplikasi belum secara otomatis mampu mengurangi risiko ketidakpatuhan maupun kelemahan pengendalian internal dalam pengelolaan

keuangan desa.(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah, 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis pengaruh kapasitas organisasi dan kolaborasi terhadap *net benefits* SISKEUDES dengan *Diffusion of Innovations* sebagai variabel mediasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi inovasi berupa SISKEUDES di Kabupaten Wonogiri, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai wujud nyata pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-16, khususnya target 16.6 mengenai pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **"PENGARUH KAPASITAS ORGANISASI DAN KOLABORASI TERHADAP NET BENEFITS SISKEUDES DENGAN DIFFUSION OF INNOVATIONS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI KABUPATEN WONOGIRI"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat kesenjangan antara besarnya potensi SISKEUDES sebagai instrumen inovasi keuangan desa dengan realitas implementasinya di lapangan. Belum optimalnya implementasi SISKEUDES di Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, kolaborasi lintas-aktor, serta proses *Diffusion of*

Innovations yang terjadi dalam lingkungan pemerintah desa. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas organisasi berpengaruh positif terhadap *Diffusion of Innovations* SISKEUDES di Kabupaten Wonogiri?
2. Apakah kolaborasi berpengaruh positif terhadap *Diffusion of Innovations* SISKEUDES di Kabupaten Wonogiri?
3. Apakah *Diffusion of Innovations* berpengaruh positif terhadap *net benefits* SISKEUDES di Kabupaten Wonogiri?
4. Apakah kapasitas organisasi berpengaruh positif terhadap kolaborasi dalam implementasi SISKEUDES di Kabupaten Wonogiri?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas organisasi dan kolaborasi terhadap *Diffusion of Innovations* SISKEUDES, menganalisis pengaruh *Diffusion of Innovations* terhadap *net benefits* SISKEUDES, serta menganalisis pengaruh kapasitas organisasi terhadap kolaborasi dalam implementasi SISKEUDES di Kabupaten Wonogiri. Melalui pengujian hubungan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang komprehensif dan dapat dijadikan landasan ilmiah dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan efektivitas implementasi SISKEUDES, sekaligus berkontribusi pada pencapaian tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan selaras dengan SDGs poin ke-16.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian yang dilakukan mampu memberikan hasil yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian literatur mengenai keberhasilan sistem informasi keuangan sektor publik, khususnya dengan mengintegrasikan variabel kapasitas organisasi dan kolaborasi yang selama ini belum mendapat perhatian memadai dalam konteks SISKEUDES. Dengan menghadirkan kedua variabel tersebut sebagai variabel independen, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang melengkapi studi-studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek teknis sistem semata. Lebih jauh, penelitian ini memberikan kontribusi empiris pada pengembangan *Diffusion of Innovations* dalam konteks tata kelola keuangan desa di Indonesia, sehingga memperkaya penerapan teori tersebut pada lingkup pemerintahan lokal yang selama ini masih terbatas dieksplorasi. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji adopsi inovasi digital di pemerintahan desa, khususnya bagi peneliti yang ingin mengembangkan pendekatan variabel mediasi berbasis difusi inovasi sebagai kerangka analisis dalam konteks *e-government* di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan yang lebih terarah dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa serta memperkuat mekanisme kolaborasi lintas-aktor dalam pengelolaan SISKEUDES, sehingga implementasi sistem dapat berjalan lebih optimal dan terukur. Pada lingkup yang lebih luas, temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi BPKP dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyempurnakan strategi pendampingan implementasi SISKEUDES. Sementara itu, bagi pemerintah desa secara langsung, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang perlu diperkuat agar implementasi SISKEUDES benar-benar mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, sekaligus menjadi bagian dari upaya nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-16, yaitu terwujudnya kelembagaan yang kuat, akuntabel, dan inklusif di tingkat pemerintahan desa.